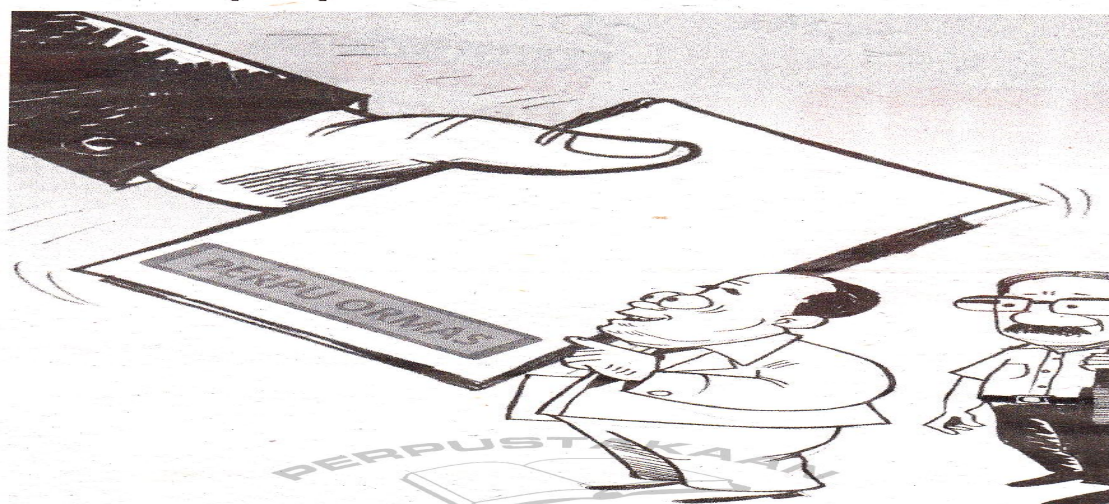


Judul : DPR Setujui Perppu Ormas?
Tanggal : Jumat, 20 Oktober 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

DPR Setujui Perppu Ormas?



Rumor Politik
Saat ini DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). DPR tengah meminta pandangan dari sejumlah kalangan, termasuk pakar-pakar, untuk mengambil sikap atas Perppu Ormas itu.

Perppu Ormas diterbitkan pemerintah untuk menertibkan ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah membantah bahwa Perppu Ormas merupakan bentuk arogansi pemerintah, seperti di era Orde Baru.

Menurut sumber *SP* di DPR, hanya dua fraksi di DPR yang akan menolak Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). "Dua fraksi itu memang sejak awal sejalan dengan ormas-ormas yang selama ini menginginkan agar Indonesia menjadi negara khilafah. Tetapi, sebagian besar fraksi sepakat untuk mengesahkan Perppu tersebut menjadi UU," kata sumber itu.

Sumber yang juga merupakan politisi di Senayan itu menegaskan, sebagian besar fraksi sepakat bahwa Perppu Ormas adalah bentuk kehadiran negara agar Indonesia tetap ada serta melindungi segenap warga negara Indonesia. "Mereka yang ingin meniadakan Pancasila digolongkan sebagai hama negara. Obat hama itu adalah Perppu Ormas. DPR pun sepakat," kata sumber itu. [E-8]